



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA SIBOLGA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNYA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 dapat di selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi Informasi capaian kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kota Sibolga Tahun 2024, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, perbaikan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024, tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang. Sekian dan terimakasih.

Sibolga, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SIBOLGA,



BUDI MULIA DARMA, S.Sos. M.M
Pembina TK.I
NIP. 19780911 200604 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring telah berakhirnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 31 Desember 2024, maka sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana setiap instansi diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang kepada instansi terkait.

Sekretariat DPRD telah menyelesaikan implementasi pelaksanaan program Kinerja yang diambil dari Renstra Tahun 2021 – 2026 yang diwujudkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Sibolga, Berdasarkan peraturan Walikota Sibolga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Satuan serta Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang mempunyai tugas Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Aparatur di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas selama tahun 2024 harus disesuaikan dengan visi dan Misi Walikota dan berkaitan dengan Visi dan Misi DPRD dalam Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD, Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perjanjian Kinerja memberikan arah yang jelas dalam upaya pertanggungjawaban peningkatan kinerja Aparatur Sekretariat DPRD Kota Sibolga dalam melaksanakan visi dan Misi yang berisikan “ **TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA DPRD KOTA SIBOLGA MELALUI INFORMASI TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA.** ” serta tercapai Misinya yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Diklat; dan Meningkatkan kinerja Aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisien dan Menumbuh kembangkan hubungan eksekutif, legislatif dan masyarakat serta membantu peningkatan kinerja DPRD Kota Sibolga.

Didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan, akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap lembaga DPRD, dan terhadap aspirasi masyarakat. Pada tahun 2024 Anggaran Sekretariat DPRD Kota Sibolga setelah APBD Perubahan sebesar **Rp. 51.613.594.552,-** yang terdiri dari : Belanja Operasi sebesar **Rp. 51.291.227.170,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 3.222.367.382,-**

Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Sibolga Tahun 2024 dapat diwujudkan dengan dukungan pelaksanaan 2 program, 15 Kegiatan dan 50 Sub kegiatan. Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk mengetahui sampai sejauh mana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kinerja kegiatannya pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kinerja sasaran memperlihatkan bahwa indikator kinerja utama yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Sibolga rata-rata menunjukkan pencapaian yang persentase **73,40 %** walaupun masih ada kegiatan yang belum mencapai sasaran sesuai target. Evaluasi kinerja atas keberhasilan yang di targetkan dalam strategi pencapaian Visi dan Misi Organisasi menurut Indikator Kinerjanya Pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencapai nilai **79,15 %**
- b. Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, mencapai nilai **67,26 %**

Sibolga, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SIBOLGA,



BUDI MULIA DARMA, S.Sos. M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19780911 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
3. Dasar Hukum	12
4. Sistematika Laporan Kinerja.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024.....	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
2.4 Metode Pengukuran / Manual Indikator Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.2 REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	55

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang diamanatkan Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, akuntabel, jelas dan tepat, yaitu berupa Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Kinerja Tahun sebelumnya dan membuat tahap Kinerja untuk tahun yang selanjutnya, sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakannya.

Untuk itu dalam era reformasi ini, Instansi dituntut untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peran Pemerintah dalam penunjang keberhasilan kinerja sangat besar, Peran ini menuntut

kompetensi yang lebih beragam dan lebih berkualitas dari para penyelenggara Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Pimpinan dan Staf.

Perubahan dari suatu penyusunan rencana pembangunan yang bersifat top down planning menjadi bottom up planning dalam bentuk Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dengan mewujudkan kinerja yang baik dinamis, dan bertanggungjawab, dekonsentrasi, desentralisasi, kesadaran atas pertanggungjawaban kinerjanya masing-masing. termasuk memfasilitasi administrasi dalam mendukung Kinerja DPRD.

2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat DPRD dibentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Sibolga dapat diuraikan sebagai berikut :

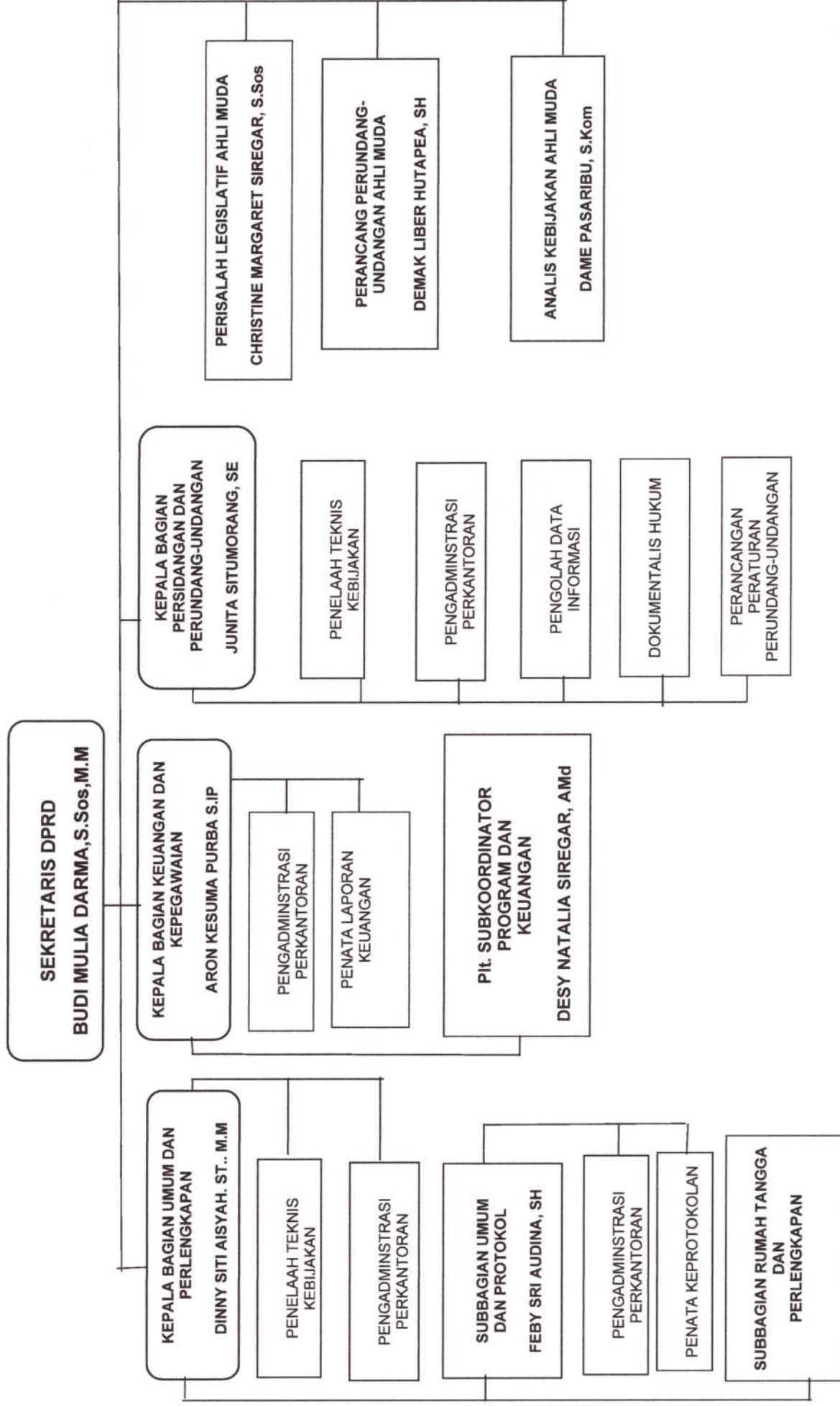
Dalam pelaksanaan kegiatannya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian setingkat Eselon III/a, yang masing – masing dibantu dengan 2 Kasubbag setingkat Eselon IV/a, antara lain :

- I. Bagian Umum dan Perlengkapan, di bantu oleh 2 Subbag :
 1. Subbag Umum dan Protokol
 2. Subbag Rumah Tangga Dan Perlengkapan
- II. Bagian Keuangan dan Kepegawaian, dibantu oleh 2 Subbag :
 1. Subbag Program dan Keuangan
 2. Subbag Kepegawaian dan Perpustakaan
- III. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, dibantu oleh 2 Subbag :
 1. Subbag Persidangan dan Risalah
 2. Subbag Perundang - Undangan dan Hukum

Tugas dan fungsi Sekretaris DPRD sebagaimana yang telah diatur sebagai berikut :

1. Sekertaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
2. Fungsi Sekretariat DPRD adalah Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD dan Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA



Sekretariat DPRD Kota Sibolga memiliki 115 orang, baik ASN, PPPK, maupun Tenaga Harian Lepas (THL) :

- a. Sekretaris : 1 orang
- b. Kepala Bagian : 3 orang
- c. Kasubbag : 2 orang
- d. Fungsional : 3 orang
- e. Staf PNS : 29 orang
- f. THL : 75 orang
- g. PPPK : 2 orang

- TOTAL : 115 orang**

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Sibolga per 31 Desember 2024 sebanyak **40** orang yang terdiri dari : Pangkat dan Golongan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

JUMLAH ESELON PADA SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II/a	Pembina (IV /a)	1
2	Eselon III/a	Pembina (IV /a)	1
3	Eselon III/a	Penata Tk. I (III/d)	2
4	Eselon IV/a	Penata Tk. I (III/b)	2
5	Fungsional	Penata Tk.I (III/d)	2
6	Fungsional	Penata (III/c)	1
7	Staf	Pembina (IV /a)	2
8	Staf	Penata Tk. I (III/d)	5
9	Staf	Penata (III/c)	2
10	Staf	Penata Muda TK. I (III/b)	4
11	Staf	Penata Muda (III/a)	9
12	Staf	Pengatur Tk. I (II/d)	3

13	Staf	Pengatur (II/c)	1
14	PPPK	IX	2
TOTAL			40

Sekretariat DPRD Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Satuan Organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD pada pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi DPRD. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga, Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kota Sibolga memiliki fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. Dalam pelaksanaan ketiga Fungsi lembaga DPRD, tidak terlepas dari Fasilitasi Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Sibolga dan dengan Ditunjang oleh berbagai aspek Eksternal (Politik dan Teknologi) dan Aspek Internal (Sumber daya manusia dan Sarana dan Prasarana). Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD ditunjang berbagai aspek yaitu :

1. Aspek Politik

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, mengamanatkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih, peran Sekretariat

DPRD untuk menjembatani dalam hal ini memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif.

2. Aspek Teknologi

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan khususnya sistem informasi dan teknologi baik di bidang pengolahan data maupun sarana lainnya mampu mempengaruhi tingkat kinerja sebuah instansi pemerintah khususnya pada Sekretariat DPRD. Pemanfaatan teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok pada Sekretariat DPRD Kota Sibolga dalam menunjang aktifitas kegiatan, menjalankan administrasi pengelolaan kepegawaian dan keuangan serta pengolahan data informasi tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota Sekretariat DPRD Kota Sibolga.

Adapun Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Sibolga, antara lain :

1. Perlunya tenaga SDM yang terampil dalam pengoperasian/operator dibidang komputer untuk disegala program dan kegiatan, agar hasil pekerjaan dibidang tersebut dapat terlaksana semaksimal mungkin dan tepat waktu.
2. Kurangnya pelayanan Prima disebabkan kurangnya koordinasi dan tanggung jawab pada pekerjaannya masing – masing.
3. Seringnya Rencana penjadwalan kegiatan DPRD tertunda dikarenakan ketidak cocokan waktu, sering benturan waktu antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya.

Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

NO.	KODE	U R A I A N	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26,661,043,932
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,375,032
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,992,832
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	63,424,360
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,957,840
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,602,808,675
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,523,879,923
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49,070,832
	4.02.01.2.02.0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	29,857,920

	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	712,541,000
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	473,805,000
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	143,000,000
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	95,736,000
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,465,327,140
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55,275,600
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295,310,700
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	223,335,940
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	709,972,500
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	539,113,000
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	123,005,400
	4.02.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519,314,000
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,661,505,769
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,049,691,700
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	83,246,300
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327,747,495
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,200,820,274

	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,833,892,900
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	17,100,000
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618,392,900
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,198,400,000
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,792,318,100
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,272,905,830
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	24,285,000
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	526,822,079
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236,628,700
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153,210,000
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9,445,329,107
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8,867,743,007
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	497,586,100
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80,000,000
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1,133,809,520
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	291,515,400

	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	918,133,600
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	407,763,700
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24,952,550,620
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,154,645,320
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	674,532,200
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	480,113,120
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	305,577,920
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	305,577,920
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,082,618,000
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	24,315,100
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25,302,000
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	340,618,100
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	339,540,800
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	352,842,000
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2,349,089,500
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1,545,178,000
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	476,000,000
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	206,000,000
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	58,638,500

	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	63,273,000
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,206,539,800
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	40,900,000
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	3,165,639,800
	4.02.02.2.08	Fasilitas Tugas DPRD	16,854,080,000
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	16,854,080,000

3. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan alasan / latar belakang penyusunan laporan kinerja, pengertian laporan kinerja, tujuan pelaporan kinerja, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta pagu anggaran tahunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar rencana strategis, rencana kerja tahunan, Perjanjian Kinerja tahunan yang bersangkutan serta perencanaan anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

-
5. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk membuat Perjanjian Kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional maupun global dalam kerangka penerapan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis pada akhirnya mampu menyelaraskan visi dan misi instansi SKPD berdasarkan potensi sumber daya, kekuatan, kelemahan, peluang dan berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat.

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD disesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota Sibolga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Sibolga, yaitu Misi ke satu Walikota mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) serta Misi ke empat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing, semua itu dapat dicapai apabila telah menjadi tekad bersama untuk mewujudkannya.

Tujuan yang direncanakan untuk dicapai tidak akan mudah diraih oleh seorang pimpinan saja, melainkan harus didukung oleh semua unsur personil/staf. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat yang harus menjadi visi bersama (*share vision*). Kondisi Sumber Daya Manusia ASN Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dapat bekerja secara optimal.

Sekretariat DPRD adalah organisasi yang mempunyai peran cukup strategis menselaraskan Visi Walikota dengan Visi Sekretariat DPRD, “terwujudnya pelayanan administrasi kepada DPRD Kota Sibolga melalui informasi teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perencanaan yang akan dilakukan sesuai dengan Misi Sekretariat DPRD yaitu :

1. Peningkatan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.
2. Peningkatan Sumber daya Pegawai Sekretariat DPRD sebagai tenaga yang membantu tujuan dan fungsi kerja kelembagaan DPRD di masyarakat.

Tujuan merupakan implementasi dari pada Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun kedepan. Gambaran tujuan Misi yang dikehendaki dalam konteks pencapaian tujuan lima tahun kedepan. Sementara Gambaran dari tujuan perencanaan yang dikehendaki dapat dirumuskan dengan melihat dan mempertimbangkan secara rinci antara beberapa jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, orang-orang yang akan menangani pekerjaan, beban atau volume pekerjaan yang sudah dirumuskan di dalam Renstra, Berdasarkan analisa diatas, maka Sekretariat DPRD Kota Sibolga harus bertanggungjawab dalam pekerjaannya. Mencapai target dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur terhadap penyelenggaraan Tata kerja DPRD dalam penyelenggaraan layanan Publik,.
2. Perwujudan kapasitas/ kompetensi / profesionalisme anggota DPRD dan Lembaga DPRD dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun
Periode Rencana Strategis**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah								
		Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Penyampaian pertanggung jawaban keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja, dan pertanggungjawa ban Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Fasilitasi jumlah rapat Pembahasan Anggaran antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi Kelambagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Tersusun dan Terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

			maupun dokumen rencana tahunan						
			Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan kunjungan kerja (kunker) Anggota DPRD	38	38	38	38	38	38
			Jumlah pelaksanaan rapat dengar pendapat anggota DPRD dengan masyarakat	36	36	36	36	36	36
			Jumlah penyelenggaraan monitoring dan reses anggota DPRD	39	39	39	39	39	39
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan DPRD	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, selanjutnya disusun Rencana Kerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kerja tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaannya. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga sepenuhnya dapat dihimpun pada Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Sibolga

NO	TUJUAN	SASARAN	URAIAN IKU OPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 2023
1	Meningkatkan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas OPD	B
		Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00
		Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1. Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100%
			2. Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja, dan	11 Dokumen

			pertanggungjawaban Set DPRD	
			3. Jumlah rapat pembahasan anggaran antara pihak Legislatif dengan Eksekutif/OPD	132 Kali
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 Kali
			2. Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD	38 Kali
			3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Anggota DPRD dengan masyarakat	36 Kali
			4. Jumlah penyelenggaraan Monitoring dan Reses anggota DPRD	39 Kali
			5. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan DPRD	30.000 Orang
			6. Jumlah Produk Hukum yang berasal dari inisiatif DPRD	1 Dokumen

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping, yang wajib di pertanggungjawabkannya dari Pimpinan Instansi. Perjanjian ini ditandatangani oleh penerima kerja, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, oleh atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja. Apabila atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja dapat kita lihat pada tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap DPRD	Persentase kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap DPRD	100%
2	Meningkatkan Kinerja pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Sibolga	Persentase Kinerja kualitas pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%

PROGRAM

ANGGARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 26.784.864.995,-

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Rp. 22.823.013.120,-

2.4 Metode Pengukuran / Manual Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga. Pengukuran kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dilakukan pada setiap awal tahun anggaran yang dituangkan dalam dokumen PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024. Penetapan Kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja dari kegiatan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, dalam kurun waktu Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dapat melakukan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Sibolga revisi / penyempurnaan terhadap indikator kinerja maupun target kinerja.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Proses pengumpulan data kinerja diarahkan pada upaya untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Pengumpulan data tersebut dilakukan berdasarkan sistem informasi kinerja dengan mengintegrasikan data kinerja dari masing-masing unit kerja yang bertanggungjawab di dalam pencatatan.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga. Pada setiap akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah, selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada para Kepala Bagian untuk mendapatkan klarifikasi serta penyesuaian seperlunya sebagai revisi.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan hasil kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Analisis dari hasil perbandingan tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab atas penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 mencakup pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran strategis.

Kinerja Kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi indikator : masukan (input), keluaran (output), hasil (out come). Sedangkan Kinerja Sasaran Strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), sedangkan pengukuran Kinerja Sasaran Strategik dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) .

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran, Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya. Indikator kinerja yang baik, harus memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Obyektif

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambisius mengenai apa yang akan diukur. terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional.

3. Cukup

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya cukup mampu untuk mengukur hasil dari kinerja aparaturnya.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Sibolga adalah :

1. Terlaksananya kursus dan pelatihan kapasitas sumber daya aparatur, indikatornya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme terhadap SDM aparatur pada Sekretariat DPRD
2. Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Indikatornya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas baik ke Pusat maupun Provinsi.
3. Terlaksananya Bimbingan Teknis pimpinan dan Anggota DPRD Indikatornya adalah untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi sumber daya lembaga perwakilan rakyat.
4. Jumlah koordinasi / konsultasi dan rapat-rapat pimpinan dan alat-alat kelengkapan dewan Indikatornya menggambarkan mengenai koordinasi / konsultasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah.
5. Terlaksananya Pembahasan Ranperda Usulan Eksekutif Indikatornya untuk memperoleh persetujuan DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah dari Usulan Eksekutif kepada Legislatif.
6. Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Indikatornya merupakan pengawasan terhadap kegiatan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah.

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

No	KRITERIA PENILAIAN	INTERVAL NILAI
1	SANGAT TINGGI	91%≥100%
2	TINGGI	76%≤90%
3	SEDANG	66%≤75%
4	RENDAH	51%≤65%
5	SANGAT RENDAH	≤50%

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Tingkat Kemajuan	Kategori	Sumber Data
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas OPD	B	A	100%	Sangat Tinggi	Laporan AKIP
		Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	82,03	99%	Sangat Tinggi	Laporan SKM
		Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1. Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100%	90%	90%	Sangat Tinggi	Laporan Keuangan Akhir Tahun
			2. Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja, dan pertanggungjawaban Set DPRD	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	Renstra, Renja, RKPD, LKPJ, Laporan Pelaksanaan Tugas
			3. Jumlah rapat pembahasan anggaran antara pihak Legislatif dengan Eksekutif/OPD	132 Kali	110 Kali	85%	Tinggi	Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi	Renja
			2. Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Kerja	38 Kali	0 Kali	0%	Sangat Rendah	Kunjungan Kerja DPRD

			(Kunker) Anggota DPRD					
			3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Anggota DPRD dengan masyarakat	36 Kali	30 Kali	83%	Tinggi	Aspirasi Penampungan Masyarakat
			4. Jumlah penyelenggaraan Monitoring dan Reses anggota DPRD	39 Kali	2 Kali	8%	Sangat Rendah	Monitoring dan Reses Dewan
			5. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan DPRD	30.000 Orang	0 Orang	0%	Sangat Rendah	Reses Anggota DPRD
			6. Jumlah Produk Hukum yang berasal dari inisiatif DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Sangat Rendah	Perda

3.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja

Dana yang dialokasikan dari Pergeseran Terakhir (Pergeseran V) APBD Kota Sibolga TA. 2024 berjumlah sebesar Rp. 51.613.594.552,- dan serapan dana Rp. 37.885.938.714,- atau 73,40 % dan capaian kinerja 80,0% Dengan rincian persentase kinerja kegiatan :

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme terhadap SDM Sekretariat DPRD

SASARAN	Indikator Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		%
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Koordinasi 25 kali ke provinsi, 0 kali ke pusat	- Koordinasi 30 kali ke provinsi, 2 kali ke Pusat	- Koordinasi 45 kali ke provinsi, 6 kali ke Pusat	- Koordinasi 100 kali ke dalam provinsi, 7 kali ke Luar Provinsi	- Koordinasi 155 kali ke dalam provinsi, 7 kali ke luar provinsi	100 Koordinasi dalam provisi	80%
		- Bimtek/ Pelatihan 6 kali ke provinsi, 6 kali ke luar provinsi	- Bimtek/ Pelatihan 4 kali ke provinsi, 7 kali ke luar provinsi	- Bimtek/ Pelatihan 15 kali ke provinsi, 1 kali ke luar provinsi	- Bimtek/ Pelatihan 34 kali ke dalam provinsi, 7 kali ke luar provinsi	- Bimtek/ Pelatihan 40 kali ke dalam provinsi, 10 kali ke luar provinsi	12 kali dalam provinsi	40 %

Tujuan 2 : Meningkatkan Keahlian dan kompetensi sumber daya Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

SASARAN	Indikator Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		%
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas/kompetensi Anggota DPRD Kota Sibolga	- Bimtek Komisi 2 kali ke Pusat, Bimtek Baleg 2 kali ke pusat, Banggar 2 kali ke pusat, Bimtek BKD 2 kali ke pusat, Banmus 2 kali ke pusat	- Bimtek Komisi 2 kali ke Pusat, Bimtek Baleg 2 kali ke pusat, Banggar 2 kali ke pusat, Bimtek BKD 2 kali ke pusat, Banmus 2 kali ke pusat	- Bimtek Komisi 2 kali ke Pusat, Bimtek Bapenperda 1 kali ke Pusat, Banggar 0 kali ke pusat, Bimtek BKD 0 kali ke pusat, Banmus 0 kali ke pusat	- Bimtek Dewan 2 Kali Dalam Provinsi 2 Kali Luar Provinsi	- Bimtek Dewan 2 Kali Dalam Provinsi, 3 Kali Luar Provinsi	Bimtek 1 kali dalam provinsi 1 kali luar provinsi	50 %
		- 15 kali provinsi, 8 kali ke pusat	- 30 kali provinsi, 5 kali ke pusat	- 48 kali provinsi, 20 kali ke pusat	- Koordinasi/ Konsultasi 24 Dalam Provinsi, 24 Luar Provinsi	- Koordinasi / Konsultasi 24 Dalam Provinsi, 24 Luar Provinsi	Koordinasi/ Konsultasi 24 Dalam Provinsi, 24 Luar Provinsi	100 %

Tujuan 3 : Ditetapkannya Peraturan Daerah Usulan Legislatif maupun Eksekutif

SASARAN	Indikator Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		%
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	1. Terlaksananya kegiatan penataan peraturan perundang-undangan	- 4 Perda - hearing 1 kali,	- 11 Perda - hearing 1 kali,	- 8 Perda - hearing 2 kali, - reses 3 kali keg	- 7 Perda - hearing 1 kali, 0	- 5 Perda - hearing 1 kali,	- 5 Perda	100 %
	2. Terlaksananya kegiatan pengawasan untuk pencapaian sasaran Perda	- reses 2 kali keg - kunker dalam daerah 30 x 20	- reses 2 kali keg - kunker dalam daerah 30 x 20	- kunker dalam daerah 11 x 20 - LKPJ 1 kali	- reses 3 kali keg 0 - LKPJ 1 kali	- reses 3 kali kegiatan - LKPJ 1 kali	- Hearing 0 Kali - reses 0 kali - LKPJ 1 Kali	0 % 0% 100%
		- LKPJ 1 kali selama 14 hari	- LKPJ 1 kali selama 14 hari	- Aspirasi Penampungan Masyarakat 1 kali	- Aspirasi Penampungan Masyarakat at 5 kali	- Aspirasi Penampungan Masyarakat 5 kali	- Aspirasi Penampungan Masyarakat 0 Kali	0%
		- Aspirasi Penampungan Masyarakat 1 kali	- Aspirasi Penampungan Masyarakat 1 kali					

Tujuan 4 : Dilaksanakannya kegiatan yang bersifat resmi oleh Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kota Sibolga

SASARAN	Indikator Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		%
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	Terlaksananya kegiatan yang bersifat resmi oleh Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kota Sibolga	- PAW 0 Kali	- PAW 0 (tidak terlaksana)	- PAW 0 Kali (tidak terlaksana)	- PAW 1 Kali	- PAW 1 Kali	PAW 1 Kali	100 %
		- Medical Check Up 0 (Tidak Terlaksana)	- Medical Check Up 0 (Tidak Terlaksana)	- Medical Check Up 0 (Tidak Terlaksana)	Sidang Paripurna Pidato Kenegaraan 1 Kali	Sidang Paripurna Pidato Kenegaraan 1 Kali	Sidang Paripurna Pidato Kenegaraan 1 Kali	100%
		- Sidang Paripurna Pidato 1 kali	- Sidang Paripurna Hari jadi Sibolga 0 (tidak Terlaksana karena suasana Covid 19)	Sidang Paripurna Pidato Kenegaraan 1 Kali	- Sidang Paripurna Hari Jadi 1 kali	- Sidang Paripurna Hari Jadi 1 kali	- Sidang Paripurna Hari Jadi 1 kali	100%
			- Sidang Paripurna Pidato 1 kali					

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan, bahwa capaian indikator kinerja utama yang memiliki nilai 80,00 % terletak pada sasaran terlaksananya kegiatan Penataan Peraturan Perundang – undangan dan Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas/kompetensi Anggota DPRD Kota Sibolga. Namun secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja Sekretariat DPRD Kota Sibolga dapat berjalan dengan sangat baik, hal ini digambarkan dengan perolehan capaian kinerjanya rata-rata 80,00%. Berdasarkan tabel di atas, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran memiliki nilai BAIK.

3.1.2 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sesuai dengan misinya Sekretariat DPRD. Peningkatan Responstifitas dan efektifitas penerapan aspirasi masyarakat, pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya perwakilan rakyat, maka untuk mengimplementasikan program dan strategi dari pencapaian kinerja tersebut harus menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Renja setiap OPD.

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1		2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas OPD	B	B	100%
		Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,03	85,00	99%
		Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1. Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	90%	100%	90%

			2. Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja, dan pertanggungjawaban Set DPRD	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
			3. Jumlah rapat pembahasan anggaran antara pihak Legislatif dengan Eksekutif/OPD	110 Kali	132 Kali	81%
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 Kali	1 Kali	100%
			2. Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD	0 Kali	38 Kali	0%
			3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat	30 Kali	36 Kali	83%

			Anggota DPRD dengan masyarakat				
			4. Jumlah penyelenggaraan Monitoring dan Reses anggota DPRD	3 Kali	39 Kali	8%	
			5. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan DPRD	0 Orang	30.000 Orang	100%	
			6. Jumlah Produk Hukum yang berasal dari inisiatif DPRD	0 Dokumen	1 Dokumen	0 %	

3.1.3 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten /Kota

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Tahun	Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten /Kota	% Capaian
		N	H	I	L	

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tidak terjadi penurunan kinerja tahun sebelumnya terjadi peningkatan kinerja, adapun keberhasilan dalam meningkatkan kinerja tahun ini berupaya mengoptimalkan fasilitas pelaksanaan rapat - rapat SKPD, masyarakat dengan DPRD, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pegawai yang ada dalam lingkup Sekretariat DPRD, mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta menjaga sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik melalui kegiatan pemeliharaan.

SASARAN	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Akhir Rencana Strategis	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7
Nilai akuntabilitas kinerja daerah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas OPD	B	B	100%	Sesuai dengan misi sekretariat DPRD memberikan pelayanan teknis administrasi dengan baik (berhasil)	Meningkatkan efektivitas penyelesaian dokumen dengan tepat waktu
Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,03	85,00	99%	Sesuai dengan misi sekretariat DPRD memberikan	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang

Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1. Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	90%	100%	90%	Sesuai dengan misi sekretariat DPRD memberikan pelayanan teknis administrasi dengan baik (berhasil)	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan Sekretariat DPRD
	2. Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja, dan pertanggungjawaban Set DPRD	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	Sesuai dengan misi sekretariat DPRD memberikan pelayanan teknis administrasi dengan baik (berhasil)	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan Sekretariat DPRD
	3. Jumlah rapat pembahasan anggaran antara pihak Legislatif dengan Eksekutif/OPD	110 Kali	132 Kali	81%	fungsi fasilitasi terhadap peningkatan kemitraan antara legislatif dan	Meningkatkan fungsi koordinasi yang sinergis antara eksekutif dan Legislatif

							eksekutif berhasil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 Kali	1 Kali	100%			fungsi fasilitasi terhadap peningkatan kemitraan antara legislatif dan eksekutif berhasil	Meningkatkan fungsi koordinasi yang sinergis antara eksekutif dan Legislatif
	2. Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD	0 Kali	38 Kali	0%			Tidak berhasil dikarenakan tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD	Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi
	3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Anggota DPRD dengan masyarakat	0 Kali	36 Kali	0%			Tidak berhasil dikarenakan tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD.	Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi
	4. Jumlah penyelenggaraan Monitoring dan Reses anggota DPRD	0 Kali	39 Kali	0%			Tidak berhasil dilaksanakan fungsi fasilitasi terhadap	Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah

						peningkatan kemitraan antara legislatif dan eksekutif	penyaluran aspirasi
	5. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan DPRD	0 Orang	30.000 Orang	0 %		fungsi fasilitasi terhadap penampungan aspirasi masyarakat berhasil	Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi
	6. Jumlah Produk Hukum yang berasal dari inisiatif DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %		Tidak terlaksana produk Hukum Yang berasal dari inisiatif DPRD	Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Sibolga pada tahun 2024 berhasil baik. Keberhasilan tersebut berkat dukungan, keseriusan dalam melaksanakan kegiatan dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menyadari tanggung jawabnya.

Sekretariat DPRD Kota Sibolga berupaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, seperti SDM dan fasilitas lain, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan perhatian dan pembenahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Sibolga adalah merupakan salah satu media akuntabilitas, yang menyajikan informasi pengelolaan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Sekretariat DPRD Kota Sibolga dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah, masalah-masalah maupun hambatan – hambatan yang dihadapi dalam hal kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan atau perbaikan pada tahun berikutnya. Laporan Kinerja mempunyai tahap – tahap dalam penyelesaian kerja satu tahun, dari LAKIP tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana kinerja Sekretariat DPRD dengan persentase baik, buruk, memuaskan dan sangat memuaskan.

Sibolga, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SIBOLGA,



BUDI MULIA DARMA, S.Sos. M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19780911 200604 1 006

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN
TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KOTA : SIBOLGA
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran			Efisiensi
							TARGET / SATUAN	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapainya Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		24,992,832	12,766,800	51.08%	48.9%
				Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Laporan Perubahan RKA	2 Laporan	2 Laporan	100%		63,424,360	51,883,400	81.80%	18.2%
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100%		19,957,840	16,596,400	83.16%	16.8%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat Daerah yang baik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji sama dengan Jumlah Pegawai	50 orang	39 orang	80%		4,523,879,923	3,589,218,618	79.34%	20.7%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	2 Laporan	100%		49,070,832	37,501,600	76.42%	23.6%
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		29,857,920	23,521,600	78.78%	21.2%
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai	162 buah	480 buah	300%		473,805,000	472,175,400	99.66%	0.3%

No	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
							TARGET / SATUAN	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	25 unit	25 unit	100%	24,285,000	21,398,000	88.12%	11.9%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100%	526,822,079	183,554,979	34.84%	65.2%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 unit	40 unit	50%	236,628,700	196,410,000	83.00%	17.0%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 unit	40 unit	50%	153,210,000	90,883,900	59.32%	40.7%
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD	20 orang	20 orang	100%	8,867,743,007	7,401,536,238	83.47%	16.5%
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Memfasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	196 paket	196 paket	100%	497,586,100	494,918,600	99.46%	0.5%
					Pelaksanaan Medical Cek Up DPRD	Jumlah pelaksanaan medical cek up DPRD	1 kali	0 kali	0%	80,000,000	-	0.00%	100.0%
					Fasilitasi Fraksi DPRD	Penyediaan kebutuhan Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	12 laporan	100%	291,515,400	282,111,000	96.77%	3.2%
			Layanan Administrasi DPRD	Memfasilitasi Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Rapat - rapat DPRD	12 laporan	12 laporan	100%	918,133,600	754,337,535	82.16%	17.8%

No	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
							TARGET / SATUAN	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 paket	12 paket	100%	407.763.700	228.646.000	56.07%	43.9%
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	50%	674.532.200	57.184.200	8.48%	91.5%
					Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	13 Dokumen	5 Dokumen	55%	480.113.120	52.969.320	11.03%	89.0%
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan Pemerintahan	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	305.577.920	200.652.065	65.66%	34.3%
					Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	24.315.100	24.315.100	100.00%	0.0%
					Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	25.302.000	-	0.00%	100.0%
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	340.618.100	81.110.700	23.81%	76.2%
					Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	339.540.800	-	0.00%	100.0%
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	352.842.000	275.004.700	77.94%	22.1%
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	20 Dokumen	3 Dokumen	40%	1.545.178.000	460.966.800	29.83%	70.2%

Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD

No	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
							TARGET / SATUAN	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Memfasilitasi dalam pelaksanaan dan peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	4 orang	40%	476.000.000	215.000.000	45.17%	54.8%	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4 orang	4 orang	100%	206.000.000	140.000.000	67.96%	32.0%	
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	58.638.500	58.638.500	100.00%	0.0%	
					Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	0 Dokumen	0%	63.273.000	-	0.00%	100.0%	
					Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	60 Laporan	0 kali	0%	40.900.000	-	0.00%	100.0%	
					Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	0 kali	0%	3.165.639.800	306.632.400	9.69%	90.3%	
			Fasilitasi Tugas DPRD	memFasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	16.854.080,080	14,911,159,597	88.47%	11.5%	
						JUMLAH				51,613,594,552	37,885,938,714	73.40%	26.6%	

Sibolga, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SIBOLGA,


BUDI MULIA DARMA, S.Sos, M.M
PEMBINA TK.I
NIP. 19780911 200604 1 006

